

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dua dekade terakhir, Tiongkok telah muncul sebagai kekuatan ekonomi global yang mengubah peta geopolitik dunia. Belt and Road Initiative (BRI) yang diluncurkan pada tahun 2013 oleh Presiden Xi Jinping merupakan salah satu proyek infrastruktur paling ambisius dalam sejarah modern.¹ Program ini melibatkan investasi triliunan dolar untuk membangun koneksi infrastruktur yang menghubungkan Asia, Afrika, Eropa, dan Oseania.²

BRI ini diposisikan sebagai bentuk kerja sama pembangunan yang menawarkan pendekatan tanpa syarat politik, yang menjadikannya menarik bagi negara berkembang.³ Melalui proyek-proyek seperti jalan raya, fasilitas energi dan sistem komunikasi, Tiongkok menawarkan alternatif baru terhadap pendekatan negara-negara Barat yang sering memberikan syarat reformasi politik dan tata kelola.⁴ Selain itu, BRI bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga menjadi alat diplomasi ekonomi dan perluasan pengaruh ideologi oleh Tiongkok di negara-negara mitra.⁵

¹ Agus Rustamana et al., “Perkembangan Awal Peradaban China Pada Masa Dinasti,” *Dewaruci: Jurnal Studi Sejarah Dan Pengajarannya* 2, no. 2 (2023): 2023.

² Andrew Chatzky James McBride, Noah Berman, “China’s Massive Belt and Road Initiative,” Council on Foreign Relations, 2023, <https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-massive-belt-and-road-initiative>.

³ Lowy Institute, “Ocean of Debt? Belt and Road and Debt Diplomacy in the Pacific” (Lowy Institute, 2022), <https://interactives.lowyinstitute.org/features/chinese-aid-map/>.

⁴ Global Development Policy Center, “China’s Overseas Development Finance Database” (Boston University, 2021), <https://www.bu.edu/gdp/chinas-overseas-development-finance/>.

⁵ Peter Connolly, “The Belt and Road Comes to Papua New Guinea: Chinese Geoeconomics with Melanesian Characteristics?,” *Security Challenges* 16, no. 4 (2020): 41–64, <https://doi.org/10.2307/26976257>.

Di kawasan Pasifik Selatan, Papua Nugini (PNG) menjadi negara pertama yang menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) BRI pada tahun 2018, yang mana sejak saat itu negara ini telah menerima sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Tiongkok.⁶ Investasi infrastruktur Tiongkok di PNG mencakup berbagai sektor strategis seperti, Kumul Submarine Cable Network, Pacific Marine Industrial Zone, Enga Provincial Hospital, Butuka Academy.

Kondisi geografis PNG yang terdiri dari lebih dari 600 pulau dengan populasi sekitar 9 juta jiwa menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai tantangan yang besar. Salah satu bentuk dari keterbatasan pembangunan di negara ini tercermin dalam akses masyarakat terhadap listrik. Pada tahun 2016 hanya 13% dari penduduk PNG yang bisa mengakses listrik.⁷ Meskipun ada peningkatan menjadi 20.5% pada tahun 2023, mayoritas masyarakat masih belum terlayani.⁸ Begitu juga dengan keterbatasan terhadap akses jalan beraspal di wilayah rural yang menunjukkan kebutuhan negara ini terhadap investasi berskala besar guna mendukung pembangunan infrastruktur umum.

Di sisi lain kehadiran Tiongkok dengan investasinya ini membuat PNG terjebak dalam dilema pembangunan yang mendesak dengan risiko ketergantungan ekonomi. Misalnya saja proyek Kumul Submarine Cable Network (KSCN) yang

⁶ Xinhua, “PNG PM Says Committed to Forging Win-Win Ties with China,” Xinhuanet, 2018, http://www.xinhuanet.com/english/2018-11/15/c_129994383.htm.

⁷ World Bank, “Papua New Guinea: Improved Access to Reliable, Affordable Energy,” World Bank, 2021, <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/04/06/papua-new-guinea-improved-access-to-reliable-affordable-energy>.

⁸ World Bank, “Access to Electricity (% of Population) - Papua Nwe Guinea,” 2023, <https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCTS.ZS?locations=PG>.

didanai oleh Exim Bank of China dengan jumlah dana sebesar \$229,1 juta.⁹ Di mana kondisi menggambarkan PNG yang mengandalkan pembiayaan eksternal Tiongkok untuk infrastruktur telekomunikasi strategis.

Kebutuhan dari PNG terhadap pembiayaan infrastruktur Tiongkok ini memicu kekhawatiran serius terkait kemampuan dari keuangan domestik dalam pembangunan. Misalnya dalam pembangunan proyek National Data Center senilai 75 juta dan jaringan telekomunikasi yang dibiayai melalui pinjaman dari Tiongkok.¹⁰ Kondisi yang menunjukkan keterbatasan sumber dana dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Disisi lain ketergantungan PNG terhadap pembiayaan Tiongkok terlihat dari total pinjaman senilai \$2 miliar.¹¹

Kebutuhan PNG terhadap Tiongkok bukan hanya dari aspek pembiayaan melainkan juga sumber daya manusianya. Karena dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek masih bergantung pada kontraktor Tiongkok. Namun kondisi ini terjadi karena adanya mekanisme dari pembiayaan Tiongkok itu sendiri yakni pelaksanaan pembangunan menggunakan tenaga kerja dari negaranya. Sehingga keterlibatan dari tenaga kerja lokal sangat minim dan transfer *knowledge* yang tidak maksimal. Beberapa proyek besar bahkan dikelola langsung oleh perusahaan asal Tiongkok seperti China Railway dan China Overseas Engineering Group (COVEC).¹²

⁹ AidData, “China Eximbank Provides \$229.1 Million Preferential Buyer’s Credit for Kumul Submarine Cable Project,” n.d., <https://china.aiddata.org/projects/61213/>.

¹⁰ Jeffrey Wall, “China’s ‘Debt-Trap Diplomacy’ Is about to Challenge Papua New Guinea and Australia,” ASPI Strategist, 2020, <https://www.aspistrategist.org.au/chinas-debt-trap-diplomacy-is-about-to-challenge-papua-new-guinea-and-australia/>.

¹¹ Ben Doherty, “Diplomatic Knife Fight’ over PNG Enters New Phase with Deepening Australia Defence Deal,” The Guardian, 2025, <https://www.theguardian.com/world/2025/aug/23/diplomatic-knife-fight-over-png-enters-new-phase-with-deepening-australia-defence-deal>.

¹² Seetao, “China Railway Construction Won a Series of Bids in Papua New Guinea,” Seetao, 2024, <https://www.seetaoe.com/details/237314.html>.

Hubungan antara Tiongkok dan PNG bukan hanya hubungan bilateral melainkan posisi PNG sebagai mitra pertama BRI juga memberikan dampak. Keseimbangan geopolitikal Pasifik Selatan menjadi taruhan karena hubungan intens dari kedua negara ini.¹³ Oleh karena itu penelitian ini juga menelaah dinamika regional, khususnya respons Australia dan Amerika Serikat terhadap keterlibatan Tiongkok di PNG.

Terdapat penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa insiatif BRI digunakan Tiongkok sebagai strategi untuk membangun hegemoninya diberbagai kawasan melalui investasi infrastruktur secara global. Fadhil Zikri dan Rizki Damayanti menjelaskan bahwa BRI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi politik dan keamanan yang memperluas pengaruh Tiongkok terhadap negara mitra.¹⁴ Pandangan ini sejalan dengan Connally yang menunjukkan bahwa keterlibatan Tiongkok di PNG melalui proyek-proyek BRI mencerminkan strategi geoekonomi yang memperkuat posisi hegemoniknya di kawasan Pasifik Selatan.¹⁵

Pemahaman mengenai dinamika strategi meningkat hegemoni global di era multipolar menjadi semakin penting untuk dikaji. Dalam lanskap internasional Tiongkok sebagai *rising power* menampilkan strategi dalam meningkatkan hegemoni yang berbeda dari model Barat. Sehingga diperlukan analisis yang mendalam menggunakan teori hegemoni Cox yang menawarkan pendekatan yang

¹³ Johannes Petry, “Beyond Ports, Roads and Railways: Chinese Economic Statecraft, the Belt and Road Initiative and the Politics of Financial Infrastructures,” *European Journal of International Relations* 29, no. 2 (June 8, 2023): 319–51, <https://doi.org/10.1177/13540661221126615>.

¹⁴ Fadhli Zikri and Rizki Damayanti, “Strategi Hegemoni China Melalui Belt Road Initiative: Implikasi Terhadap Tata Kelola Politik Dan Keamanan Di Asia,” *Journal of Political Issues* 7, no. 1 (May 23, 2025): 1–16, <https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.316>.

¹⁵ Peter Connolly, “The Belt and Road Comes to Papua New Guinea,” *Security Challenges* 16, no. 4 (2020): 41–64.

mengintegrasikan material, ide, dan institusional dalam menganalisis strategi meningkatkan hegemoni di suatu negara.

1.2 Rumusan Masalah

Investasi infrastruktur yang dilakukan Tiongkok di PNG melalui BRI mencerminkan strategi dari negara ini dalam memperluas pengaruhnya dan meningkatkan hegemoninya di Pasifik Selatan. PNG sebagai negara yang membutuhkan pembiayaan eksternal menyambut baik kehadiran Tiongkok di Pasifik dengan bergabung dengan kerangka kerja sama ekonomi BRI. Proyek infrastruktur ini bukan hanya mengenai pembangunan fisik melainkan juga berfungsi sebagai strategi dalam memperluas pengaruh.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, dapat dirumuskan pertanyaan penelitiannya yakni Bagaimana strategi Tiongkok dalam meningkatkan hegemoninya di PNG melalui investasi infrastruktur dalam kerangka BRI?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana konsep hegemoni Cox digunakan untuk memahami strategi Tiongkok dalam meningkatkan hegemoninya di PNG melalui investasi infrastruktur.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada semua orang, khususnya mahasiswa hubungan internasional mengenai strategi meningkatkan hegemoni melalui investasi infrastruktur.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu membantu masyarakat mengetahui, mendapatkan wawasan serta pengetahuan empiris mengenai bagaimana strategi Tiongkok dalam meningkatkan hegemoninya melalui infrastruktur di PNG.

1.6 Studi Pustaka

Dalam penelitian ini terdapat lima studi literatur yang ditemukan sesuai dengan topik penelitian yang diteliti. Artikel pertama ditulis oleh Peter Connolly pada tahun 2020 dengan judul “*The Belt and Road comes to Papua New Guinea: Chinese Geoeconomic with Melanesian characteristics?*”¹⁶ Artikel ini menjelaskan mengenai keterlibatan dari Tiongkok di PNG dalam kerangka BR. Fokus penelitiannya mengenai bagaimana proyek infrastruktur dijadikan sebagai strategi geopolitik Tiongkok. Didalam penelitian ini dijelaskan bahwa PNG merupakan negara pertama yang menandatangani MoU BRI dan telah menerima sejumlah proyek besar dari BUMN Tiongkok.

Artikel ini menggunakan pendekatan geopolitik dan geoekonomi untuk menganalisis instrumen ekonomi yang digunakan negara untuk mencapai tujuan strategis politik luar negerinya. Penelitian ini menyimpulkan Tiongkok yang menggunakan BRI sebagai kerangka untuk meningkatkan pengaruh geoekonomi dan peran dari PNG sebagai aktor aktif yang memanfaatkan persaingan global. Artikel ini juga sangat relevan dengan topik yang peneliti angkat karena menjelaskan bagaimana Tiongkok menggunakan proyek-proyek infrastruktur untuk meningkatkan pengaruh dalam ranah geopolitik serta keikutsertaan dari PNG dalam kerangka BRI.

¹⁶ Connolly, “The Belt and Road Comes to Papua New Guinea: Chinese Geoeconomics with Melanesian Characteristics?”

Penelitian yang berfokus pada aspek geoekonomi dan geopolitik ini, tidak secara khusus mengaitkan dinamika geoekonomi tersebut dengan struktur hegemoni. Sedangkan peneliti akan menggunakan teori hegemoni Cox untuk menganalisis bagaimana Tiongkok meningkatkan hegemoninya di PNG melalui investasi infrastruktur dengan mengintegrasikan tiga aspek dalam membentuk tatanan hegemonik yakni material, ide dan institusional.

Artikel kedua berjudul “*Long Road Ahead as Papua New Guinea Explore the China's Belt and Road (BRI) Initiative*”¹⁷ yang ditulis oleh Alex Kerang pada tahun 2020. Penelitian ini menjelaskan mengenai kerangka kerja sama BRI secara mendalam dengan implementasinya di PNG. Selain itu penelitian ini juga menganalisis berdasarkan perspektif dari PNG sebagai negara penerima yang mendapatkan keuntungan serta adanya tantangan yang dihadapi oleh PNG ketika bergabung dengan kerangka kerja sama BRI.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *policy analysis* yang berfokus pada dampak yang ditimbulkan dari proyek pembangunan strategis Tiongkok di PNG. Sehingga penelitian menyimpulkan bahwa PNG memiliki “*long road ahead*” yang berarti bahwa PNG secara maksimal memanfaatkan potensi dari kerangka kerja sama BRI. PNG sangat mementingkan kapasitas dari pembangunan serta penguatan kelembagaan guna memaksimalkan keuntungan yang bisa didapat dengan meminimalisasikan risiko yang akan ditimbulkan.

Relevansi dari penelitian ini dengan topik yang peneliti bahas adalah adanya kontribusi dari pada akademisi PNG yang memberikan pemahaman mengenai

¹⁷ Alex Kerang, “Long Road Ahead As Papua New Guinea Explore the China's Belt and Road (BRI) Initiative,” *SSRN Electronic Journal*, no. August (2020): 1–38, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3664449>.

bagaimana perspektif dari domestik dan pertimbangan kebijakan dalam menghadapi investasi infrastruktur Tiongkok. Selain itu penelitian ini juga lebih memfokuskan pada arah kebijakan dari PNG. Sedangkan peneliti menganalisis bagaimana strategi Tiongkok dalam meningkatkan hegemoninya di PNG melalui investasi infrastruktur dengan pendekatan hegemoni Cox.

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Johannes Petry dengan judul "*Beyond Ports, Roads and Railways: Chinese Economic Statecraft, the Belt and Road Initiative and the Politics of Financial Infrastructures*"¹⁸ pada tahun 2023. Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai bagaimana BRI digunakan oleh Tiongkok sebagai diplomasi ekonomi dan dampaknya terhadap tatanan global. Selain itu penelitian ini menjelaskan bagaimana institusi keuangan dibawah kerangka BRI yang digunakan untuk menciptakan tata kelola keuangan alternatif. Hal ini dilakukan oleh Tiongkok untuk meningkatkan pengaruhnya dalam menyaingi dominasi yang dilakukan Barat.

Relevansi dari penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah penggunaan dari institusi keuangan BRI dalam strategi meningkatkan pengaruh sebagaimana juga termasuk kedalam aspek material hegemoni. Sedangkan untuk perbedaanya terletak pada keterkaitan dari BRI dengan negara mitra atau tidak secara spesifik menggunakan PNG sebagai studi kasus sebagaimana yang peneliti lakukan. Begitu juga dengan penggunaan teori hegemoni Cox untuk menganalisis strategi Tiongkok dalam meningkatkan hegemoninya di PNG.

Referensi berikutnya artikel dari Lee Jones dan Shahar Hameiri berjudul "*Debunking the Myth of 'Debt trap Diplomacy': How Recipient Countries Shape*

¹⁸ Petry, "Beyond Ports, Roads and Railways: Chinese Economic Statecraft, the Belt and Road Initiative and the Politics of Financial Infrastructures."

*China's Belt and Road Initiative*¹⁹ di tahun 2020. Penelitian ini menganalisis bagaimana tuduhan mengenai *debt trap diplomacy* yang dilakukan Tiongkok dalam BRI. Penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan mengenai tuduhan tersebut sangat minim sekali buktinya. Serta menjelaskan juga kritikan yang diberikan kepada Tiongkok yang dianggap bahwa kebijakan yang dilakukannya menjerat negara miskin dan berkembang dalam mekanisme pinjaman yang tidak berkelanjutan.

Artikel ini menggunakan studi kasus dari negara Malaysia dan Sri Lanka yang juga memiliki peranan penting dalam kebijakan mereka dalam membentuk atau membangun proyek-proyek dibawah kerangka BRI sesuai dengan kepentingan domestik masing-masing negara. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa narasi *debt trap diplomacy* merupakan bentuk penolakan Barat terhadap keberadaan BRI Tiongkok. Keterkaitan penelitian ini dengan topik yang peneliti bahas adalah pemahaman mengenai aspek ide dalam kerangka Cox mengenai narasi yang didapat digunakan untuk membentuk pandangan publik mengenai suatu negara atau kebijakan yang dikeluarkannya.

Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan yakni teori hegemoni Cox. Penelitian ini menjelaskan mengenai ide melalui narasi dan dampaknya terhadap pandangan publik mengenai BRI Tiongkok. Sedangkan peneliti menggunakan ketiga aspek tersebut dalam menganalisis strategi Tiongkok dalam meningkatkan hegemoninya di PNG melalui investasi infrastruktur.

¹⁹ Jones Lee and Hameiri Shahar, “Debunking the Myth of ‘Debt-Trap Diplomacy’ How Recipient Countries Shape China’s Belt and Road Initiative,” *Asia-Pacific Programme*, 2020, <https://www.chathamhouse.org/2020/08/debunking-myth-debt-trap-diplomacy.v>

Artikel terakhir ditulis oleh Mukesh Shankar Bharti dan Suprabha Kumari dengan judul "*China's Belt and Road Initiative in Southeast Asia and its Implications for ASEAN-China Strategic Partnership*"²⁰ di tahun 2024. Melalui penelitian ini dijelaskan mengenai implementasi dari BRI di Asia Tenggara dan dampaknya terhadap *ASEAN-China Strategic Partnership*. Disebutkan bahwa pentingnya proyek-proyek infrastruktur dalam membangun hubungan kerja sama antara Tiongkok dan negara-negara di ASEAN.

Kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan keberhasilan dari Tiongkok melalui BRI dalam membentuk struktur kelembagaan yang memperdalam integrasi ekonomi antara Tiongkok dan ASEAN. Selain itu juga dijelaskan mengenai dinamika evolusi dari hubungan Tiongkok-ASEAN dalam kerangka BRI dengan menggunakan pendekatan analisis institusional. Keterkaitan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni mengenai struktur kelembagaan yang dibentuk melalui BRI yang digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan pengaruh di negara mitra.

Perbedaan utama dari penelitian ini terletak pada fokus regional yang menjadi studi kasus. Artikel ini berfokus pada kawasan Asia Tenggara pada tingkat regional. Sedangkan di dalam penelitian ini menggunakan PNG sebagai studi kasus negara. Disisi lain artikel ini juga tidak menggunakan teori hegemoni Cox sebagaimana yang peneliti gunakan untuk menganalisis strategi Tiongkok dalam meningkatkan hegemoninya di PNG.

²⁰ Mukesh Shankar Bharti and Suprabha Kumari, "China's Belt and Road Initiative in Southeast Asia and Its Implications for ASEAN-China Strategic Partnership," *Asian Review of Political Economy* 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1007/s44216-024-00042-4>.

Berdasarkan lima studi literatur yang dijelaskan diatas, pendekatan yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap PNG berfokus pada implementasi dari BRI pendekatan ekonomi dan infrastruktur. Namun belum ada yang secara sistematis menggunakan teori hegemoni Robert Cox untuk menjelaskan bagaimana investasi infrastruktur digunakan untuk meningkatkan hegemoninya melalui integrasi tiga aspek tersebut yakni material, ide dan institusi. Sehingga penelitian ini berupaya untuk mengisi celah tersebut dalam memberikan analisis secara menyeluruh terhadap strategi dari Tiongkok dalam meningkatkan hegemoninya di PNG.

1.7 Kerangka Konseptual

Dalam hubungan internasional kontemporer, pemahaman mengenai konsep hegemoni untuk dipahami. Pendekatan untuk membangun hegemoni melalui dominasi militer atau secara koersif tidak lagi relevan untuk dilakukan. Dalam membangun hegemoni dapat dilakukan dengan menciptakan legitimasi dan penerimaan global.²¹ Seperti teori hegemoni yang dikembangkan oleh Robert W. Cox dari pemikiran Antonio Gramsci. Cox menjelaskan bahwa dalam membangun tatanan hegemoni dapat dilakukan melalui integrasi material, ide dan institusi.²² Melalui pendekatan ini akan memberikan pemahaman yang mendalam bahwa dalam membangun tatanan hegemoni dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan tanpa harus menggunakan kekuatan koersif atau paksaan melainkan dengan mengintegrasikan ketiga aspek tersebut.

²¹ Amitav Acharya, ““After Liberal Hegemony: The Advent Of A Multiplex World Order,” n.d., 271–85.

²² Robert W. Cox, “Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method,” *Millennium: Journal of International Studies* 12, no. 2 (June 1, 1983): 162–75, <https://doi.org/10.1177/03058298830120020701>.

konsep hegemoni Cox ini tidak terbatas pada analisis di tingkat global maupun regional saja melainkan ditingkatkan hubungan bilateral negara juga dapat diterapkan. Melalui hubungan bilateral ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana strategi suatu negara membangun hegemoni maupun meningkatkan hegemoninya di negara lain.²³ Hal ini bersamaan dengan perkembangan era globalisasi dan ketergantungan negara terhadap ekonomi. Kebutuhan akan ekonomi ini diwujudkan melalui kerja sama ekonomi pembangunan, investasi, infrastruktur ataupun pembentukan institusi bersama. sehingga mencerminkan adanya pergeseran dari dominasi koersif menuju non-koersif yang dibangun melalui ekonomi, *soft power*, dan kerangka kelembagaan.²⁴

1.7.1 Material

Dalam kerangka hegemoni Cox, material material mencakup sumber daya fisik dan ekonomi yang menjadi dasar dari terbentuknya tatanan hegemoni.²⁵ Melalui aspek material ini kapasitas finansial, keunggulan teknologi, pembangunan infrastruktur dan kemampuan produksi dapat digunakan untuk memberikan manfaat nyata bagi negara mitra sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Aspek material ini menjadi pondasi utama dalam membentuk legitimasi yang dibangun dalam tatanan hegemonik. Karena dari material ini sumber dari penyediaan fisik dan jasa yang dibutuhkan oleh negara penerima.²⁶

²³ Andreas Bieler and Adam Morton David, “A Critical Theory Route to Hegemony, World Order and Historical Change,” *Mastering Advanced English Language*, 1997, 117–36, https://doi.org/10.1007/978-1-349-13645-2_7.

²⁴ G. John Ikenberry, “The Rise of China and the Future of the West: Can the Liberal System Survive,” *Foreign Affairs*, no. 187 (2008), <https://www.jstor.org/stable/20020265>.

²⁵ Cox, “Gramsci, Hegemony and International Relations : An Essay in Method.”

²⁶ Piotr Dutkiewicz, Tom Casier, and Jan Aart Scholte, *Hegemony and World Order Reimagining Power in Global Politics*. Routledge, Polis. Political Studies (Routledge, 2021).

Keberadaan dari material ini dapat digunakan untuk membangun penerimaan yang lebih berkelanjutan.²⁷ Melalui material yang tercermin dalam penyediaan dana, transfer teknologi sampai mobilisasi sumber daya dapat menciptakan ketergantungan tanpa adanya ancaman secara langsung. Sehingga dari keberadaan dari material ini membuat negara penerima merasa diuntungkan sehingga bersedia untuk mendukung tatanan hegemoni yang dilakukan oleh negara mitranya.

Aspek material ini dapat diidentifikasi melalui proyek-proyek pembangunan strategis. Penyediaan dana dapat terealisasi dalam bentuk pinjaman lunak, hibah dan fasilitas kredit. Transfer teknologi dan sumber daya manusia dapat dilihat dari pembangunan proyek infrastruktur yang diberikan oleh kekuatan hegemoni di negara mitra. sehingga material ini tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik ataupun penyediaan dana semata tetapi berfungsi sebagai instrumen politik dalam membangun tatanan hegemoni.²⁸

1.7.2 Ide

Ide dalam kerangka Cox merujuk pada penyebaran nilai, norma dan gagasan yang digunakan untuk menopang tatanan hegemoni.²⁹ Penyebaran nilai, norma maupun gagasan ini direalisasikan melalui narasi yang disampaikan atau diusung oleh kekuatan hegemoni. Sehingga ide ini berfungsi untuk memberikan gambaran bahwa struktur kekuasaan yang ada dapat diterima karena bisa memberikan manfaat nyata bagi negara mitra. Narasi dalam aspek ide dapat mencakup model

²⁷ Dutkiewicz, Casier, and Scholte.

²⁸ Dutkiewicz, Casier, and Scholte.

²⁹ Cox, "Gramsci, Hegemony and International Relations : An Essay in Method."

pembangunan alternatif, konsep keadilan global, serta visi tata kelola internasional yang sejalan dengan kepentingan hegemon.³⁰

Hegemoni tidak hanya bertahan karena keunggulan material melainkan juga peran penting dari ide yang disebarluaskan dan diterima secara luas. Seperti dengan menyebarkan narasi yang menekankan kerja sama dengan kesetaraan atau kerja sama saling menguntungkan sehingga legitimasi kekuatan hegemoni dapat diterima. Hal ini dalam pandangan Gramsci dikatakan sebagai penciptaan common sense, yakni sebuah pemahaman bersama yang membuat tatanan hegemoni dapat diterima sesuatu yang wajar.³¹

Salah satu bentuk penerapan ide ini misalnya narasi pembangunan yang berbeda dengan paradigma Barat, kerja sama yang mengutamakan kesetaraan dan manfaat bersama. Selain itu narasi lainnya yang disebarluaskan oleh kekuatan hegemon dapat berupa bahwa pembangunan berkelanjutan antara kekuatan hegemon dengan negara mitra dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kepentingan sosial.³² Dalam ide ini instrumen *soft power* dapat dengan melakukan pertukaran budaya, program pendidikan, kerja sama akademik dapat digunakan untuk menyebarkan nilai guna mendukung tatanan hegemoni.

1.7.3 Institusi

Institusi berhubungan dengan mekanisme kelembagaan yang menjadi sarana dalam menjalankan tatanan hegemoni.³³ Melalui institusi yang tercermin dalam institusi formal maupun informal ini integrasi dari aspek material dan ide

³⁰ Cox.

³¹ Cox.

³² William A. Callahan, “China’s ‘Asia Dream’: The Belt Road Initiative and the New Regional Order,” *Asian Journal of Comparative Politics* 1, no. 3 (2016): 226–43, <https://doi.org/10.1177/2057891116647806>.

³³ Cox, “Gramsci, Hegemony and International Relations : An Essay in Method.”

direalisasikan dalam institusi ini. Dengan adanya institusi ini kerangka kerja sama dapat dibentuk sehingga dapat dijalankan secara berkelanjutan dan sistematis.³⁴ Sehingga tatanan hegemoni menjadi lebih stabil karena ketiga aspek ini diintegrasikan yang membuat hubungan antara kekuatan hegemon dengan negara mitra menjadi lebih kuat karena adanya aturan yang mengikat keduanya.

Aspek institusi ini sangat penting bagi keberlanjutan jalannya material dan ide karena melalui institusi ini dibentuk sebuah kebijakan atau aturan yang nantinya disepakati oleh pihak terkait. Selain digunakan sebagai sarana dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dibentuk, aspek institusi ini juga digunakan untuk membangun komitmen jangka panjang dan konsisten antara kekuatan hegemon dengan negara mitra. Sehingga institusi ini sangat penting untuk memperkuat legitimasi dalam tatanan hegemoni. Dalam hubungan bilateral institusi ini dapat berupa pembentukan organisasi bersama, pendirian lembaga pembiayaan, forum multilateral, konferensi ataupun perjanjian dalam sektor tertentu.³⁵

Pendekatan Cox dengan tiga aspek ini memungkinkan analisis yang lebih dalam mengenai investasi infrastruktur. Dalam kerangka ini, pembangunan infrastruktur bukan hanya sarana pembangunan fisik melainkan sebagai instrumen dalam meningkatkan hegemoni. Tiongkok memanfaatkan ketiga aspek ini agar strategi dalam meningkatkan hegemoninya di PNG dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Maka dari itu, teori hegemoni Cox menjadi dasar analisis penelitian ini dalam mengkaji strategi Tiongkok dalam meningkatkan hegemoninya di PNG.

³⁴ Cox.

³⁵ Dutkiewicz, Casier, and Scholte, *Hegemony and World Order Reimagining Power in Global Politics*. Routledge,.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode kualitatif ini dideskripsikan sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikannya dengan data dan fakta.³⁶ Penelitian ini melalui studi pustaka dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari artikel-jurnal, artikel, berita, maupun buku yang berkaitan dengan strategi Tiongkok dalam meningkatkan hegemoninya melalui investasi infrastruktur di PNG.

1.8.2 Batasan Penelitian

Secara metodologis, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis kualitatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak mengukur dampak kuantitatif secara statistik atau melakukan analisis ekonomi empiris terhadap investasi infrastruktur. Fokus penelitian dibatasi pada aspek strategi meningkatkan hegemoni melalui investasi infrastruktur, sehingga aspek lain seperti kekuatan militer tidak menjadi fokus utama.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Dalam penelitian ini, unit analisis merujuk pada aktor konkret yang menjadi pusat perhatian dalam kajian, yaitu negara Tiongkok sebagai aktor utama yang meningkatkan hegemoni. Sedangkan unit eksplanasinya yakni strategi Tiongkok dalam meningkatkan hegemoninya di PNG dalam kerangka BRI.

Sementara itu, tingkat analisis yang digunakan adalah tingkat individu. Penelitian ini memandang bahwa keputusan dan kebijakan Presiden Tiongkok serta

³⁶ Mouwn Erland, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2020.

pemangku kebijakan utama yang menentukan strategi Tiongkok dalam meningkatkan hegemoninya melalui BRI yang direalisasikan melalui investasi infrastruktur.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi. Data sekunder dipilih karena relevan dan memadai untuk mengkaji persoalan strategi peningkatan pengaruh yang terefleksi dalam dokumen resmi, laporan lembaga, dan wacana media. Data akan diperoleh dari dokumen kebijakan dan strategi dari pemerintah PNG dan Tiongkok, laporan resmi dari lembaga internasional seperti World Bank, Asian Development Bank, dan Lowy Institute, publikasi akademik, artikel ilmiah, serta laporan think tank dan artikel berita dan siaran pers dari media internasional maupun regional yang relevan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi terhadap data sekunder, yaitu data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen tertulis dan dapat diakses secara daring maupun luring. Penggunaan data sekunder dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap narasi mengenai strategi meningkatkan hegemoni geopolitik, yang secara umum tercermin melalui pernyataan resmi, kebijakan publik, dan publikasi lembaga lembaga internasional.

Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan akuisisi dokumen yang relevan, antara lain dokumen kebijakan dan pernyataan resmi pemerintah. Peneliti akan mengumpulkan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah PNG dan Tiongkok termasuk pidato resmi, rencana pembangunan

nasional, pernyataan bersama bilateral, serta siaran pers kementerian luar negeri. Dokumen ini diakses melalui situs resmi seperti MoU BRI antara Tiongkok dan PNG (2018), pidato Perdana Menteri PNG dalam KTT APEC 2018, Joint Press Statement PNG-Tiongkok (2019), Asian Development Bank lalu World Bank dan Ministry of Foreign Affairs of Tiongkok.

Data selanjutnya dari laporan dan kajian dari lembaga internasional dan think-tank, seperti laporan tahunan, analisis kebijakan, dan kajian strategis dari lembaga seperti Lowy Institute, Carnegie Endowment, dan Center for Strategic and International Studies (CSIS) juga dikumpulkan sebagai bahan analisis utama. Laporan-laporan ini sering kali memuat penilaian terhadap dinamika geopolitik serta strategi kekuatan besar di Pasifik, termasuk PNG. Lalu artikel ilmiah dan jurnal akademik seperti Pacific Affairs, Third World Quarterly, Journal of Contemporary Tiongkok, dan International Affairs dijadikan acuan untuk memperoleh kerangka konseptual dan tinjauan empiris. Artikel-artikel tersebut diperoleh melalui basis data seperti JSTOR, ScienceDirect, dan Taylor & Francis Online.

Kemudian juga dari media massa dan sumber informasi populer beberapa laporan media kredibel seperti BBC, The Diplomat, ABC News Australia, dan Al Jazeera digunakan untuk mendapatkan narasi yang berkembang di ruang publik terkait proyek-proyek infrastruktur dan tanggapan masyarakat lokal terhadap proyek tersebut. Setiap dokumen yang dikumpulkan akan diseleksi berdasarkan kriteria relevansi, otoritas sumber, waktu publikasi (diprioritaskan antara tahun 2013-2024), dan aksesibilitas. Data yang terkumpul kemudian dikategorikan berdasarkan jenis aktor (negara, lembaga internasional, masyarakat lokal), konteks

proyek (infrastruktur, kerja sama ekonomi, bantuan pembangunan), serta aspek hegemoni yang dianalisis (dominasi, persetujuan, penolakan).

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yang menyertakan metode penghimpunan dan uraian data. Dalam pengertiannya, teknik analisis data didefinisikan sebagai proses mencari data dan menyusun data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan bahan lainnya secara sistematis, yang hasilnya bisa mudah dimengerti serta diinformasikan kepada orang lain.³⁷ Dalam praktiknya, analisis kualitatif bersifat induktif yang artinya temuan dari data lapangan dikembangkan menjadi dugaan atau kesimpulan sementara.

Dalam penelitian ini, sumber utama data yang diperoleh melalui data sekunder, yakni informasi yang sudah tersedia sebelumnya seperti artikel, buku dan literatur lainnya. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan dan disusun ke dalam bab-bab penelitian agar pembahasan lebih runut. Selanjutnya, setiap data yang telah terorganisir dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengungkapkan permasalahan secara mendalam, terarah dan komprehensif.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan studi pustaka, kerangka

³⁷ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin” 17, no. 33 (2018): 81–95.

konseptual, metodologi penelitian, batasan masalah, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penelitian.

BAB II Hubungan Tiongkok dan Papua Nugini dalam Konteks BRI

Bab ini akan memaparkan hubungan bilateral antara Tiongkok dengan PNG. Kemudian akan menjelaskan mengenai PNG sebagai mitra pertama BRI di Pasifik. Lalu akan membahas mengenai dinamika regional yang mempengaruhi hubungan kedua negara serta konteks strategis Tiongkok dalam meningkatkan hegemoni di kawasan.

BAB III Proyek-proyek Infrastruktur Tiongkok di Papua Nugini dalam Konteks BRI

Bab ini akan membahas mengenai proyek-proyek infrastruktur konkret sebagai manifestasi strategi peningkatan pengaruh. Kemudian akan membahas detail investasi infrastruktur di berbagai sektor dan mekanisme pemberiannya. Selanjutnya akan membahas bagaimana proyek-proyek ini menciptakan ketergantungan struktural dan meningkatkan hegemoni Tiongkok.

BAB IV Strategi Tiongkok Meningkatkan Hegemoninya di Papua Nugini Melalui Pembangunan Infrastruktur

Bab ini membahas mengenai penerapan ketiga aspek hegemoni Cox dalam menganalisis strategi Tiongkok dalam meningkatkan hegemoninya. Akan dianalisis aspek material melalui proyek infrastruktur, aspek ide melalui narasi dan model pembangunan, serta aspek institusi melalui mekanisme kerjasama. Selanjutnya akan dibahas interaksi dan sinergi dari ketiga aspek tersebut dalam meningkatkan hegemoni.

BAB V Penutup

Bab terakhir ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Kesimpulan ini akan bersumber dari temuan temuan pada penjelasan bab-bab sebelumnya mengenai bagaimana konsep hegemoni Cox dapat menjelaskan strategi Tiongkok dalam meningkatkan hegemoninya di PNG melalui infrastruktur. Di bagian ini juga akan disertakan saran serta rekomendasi yang bisa menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

